

ABSTRAK

Salah satu tahapan terpenting dalam penyelenggaraan pemilu adalah kampanye. Berbagai kebijakan hukum berupa UU Pemilu dan Peraturan KPU telah mengatur batasan-batasan dalam kampanye. Salah satu batasan dalam kampanye yaitu larangan kampanye di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Namun kemudian adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu karena pasal tersebut dinilai inkonsisten dengan penjelasan pasal tersebut sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya problematika hukum dalam pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut bagaimana kebijakan kampanye pemilu di perguruan tinggi pasca Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta bagaimana implikasi pasca putusan MK terhadap kebijakan kampanye pemilihan umum di perguruan tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekali pun Putusan MK memperbolehkan kampanye di perguruan tinggi, hal tersebut mengakibatkan terjadinya perdebatan hukum. Adanya tidak sesuaian antara netralitas perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam UU Dikti, serta netralitas dosen ASN sebagai bagian dari perguruan tinggi. Sehingga dengan demikian perguruan tinggi harus bersikap tegas dan berkomitmen dengan menyusun regulasi internal untuk mempertahankan netralitas perguruan tinggi.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemilihan Umum, Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

One of the most important stages in organizing elections is the campaign. Various legal policies in the form of the Election Law and KPU Regulations have regulated the limitations of the campaign. One of the restrictions in the campaign is the prohibition of campaigning in universities as stipulated in Article 280 paragraph (1) letter h of the Election Law. However, later there was a request for a judicial review of Article 280 paragraph (1) letter h of the Election Law because the article was considered inconsistent with the explanation of the article, resulting in legal uncertainty. So that this has resulted in legal problems in the implementation of campaigns in universities. In this regard, how is the election campaign policy in higher education after the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 and what are the implications of the Constitutional Court's decision on the general election campaign policy in higher education.

This research is normative legal research. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this study show that even though the Constitutional Court Decision allows campaigning in higher education, it results in legal debates. There is a discrepancy between the neutrality of higher education as stipulated in the Higher Education Law, and the neutrality of ASN lecturers as part of higher education. Thus, universities must be firm and committed by drafting internal regulations to maintain university neutrality.

Keywords: Policy, General Election, the University.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.4.1 Kegunaan Teoritis	12
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	13
1.5 Keaslian Penelitian	13
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	18
BAB II KEBIJAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI PERGURUAN TINGGI.....	20
2.1 Teori Kebijakan	20
2.1.1 Pengertian Kebijakan	20
2.1.2 Bentuk Kebijakan	21
2.2 Teori Demokrasi	23
2.3 Pemilihan Umum Di Indonesia.....	27

2.3.1 Pemilihan Umum dan Sistem Pemilihan Umum.....	27
2.3.2 Kampanye Pemilihan Umum	30
2.4 Netralitas dan Independensi Perguruan Tinggi.....	34
BAB III KEBIJAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI PERGURUAN TINGGI DAN IMPLIKASI YURIDIS PASCA PUTUSAN MK NOMOR 65/PUU-XXI/2023	38
3.1 Kebijakan Kampanye Pemilihan Umum Di Perguruan Tinggi Pasca Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	38
3.2 Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Perguruan Tinggi.....	67
BAB IV PENUTUP.....	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian	12
-----------------------------------	----